

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS (*Vrijspraak*) (Studi Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT.TJK)

**Oleh
Fransisca Emilia**

Perkara pembunuhan yang melibatkan terdakwa SY bermula pada putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 243/Pid.B/2020/PN.Mgl merupakan kasus yang menarik perhatian publik. Kasus ini melalui proses hukum yang panjang, di mana terdakwa awalnya divonis bersalah dengan pidana penjara selama 17 tahun. Namun, dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT.TJK membebaskan terdakwa dari semua dakwaan. Adapun permasalahan pada skripsi ini yaitu bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan terhadap putusan bebas pada Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT.TJK, apakah putusan hakim sesuai dengan keadilan substantif.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris serta dalam pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Menggala, Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa putusan bebas Pengadilan Tinggi Tanjungkarang didasarkan pada kurangnya bukti yang sah dan meyakinkan, dengan penerapan asas *in dubio pro reo*. Namun, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan menjatuhkan hukuman lebih berat 20 tahun penjara kepada terdakwa Berinisial SY, karena dinyatakan turut serta dalam perkara ini bersama dengan terdakwa T. Penulis menemukan kekeliruan analisis fakta oleh majelis hakim. Hakim tingkat banding, lebih mengutamakan keterangan terdakwa dibandingkan dengan alat bukti lain di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pembuktian dalam sistem hukum pidana harus mengutamakan keseimbangan antara hak terdakwa dan hak korban untuk mencapai keadilan substantif, Putusan hakim dalam perkara pemerkosaan dan pembunuhan harus mencerminkan keadilan substantif, tidak hanya kepastian hukum formal. Mahkamah Agung mengoreksi

Fransisca Emilia

putusan bebas pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menegaskan alat bukti yang cukup. Hakim berperan menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan korban, dan dampak sosial dalam setiap keputusan.

Sebagai saran para penegakan hukum terhadap tindak pidana berat harus dilakukan dengan cermat. Peningkatan penyidikan, alat bukti, dan dakwaan diperlukan agar keadilan tercapai. Perlindungan saksi, korban, serta transparansi peradilan harus diperkuat. Putusan bebas terdakwa mencerminkan keadilan substantif jika bukti tidak cukup. Penyidikan dan dakwaan harus diperkuat. Hakim wajib mempertimbangkan bukti baru dalam banding, sementara korban tetap mendapatkan perlindungan hukum dan psikologis.

Kata Kunci: Putusan Bebas (*Vrijspraak*), Pemerkosaan, Pembunuhan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE RESPONSIBILITY OF THE ACCUSER OF THE CRIME OF RAPE AND MURDER AGAINST THE VERDICT OF FREE (*Vrijspraak*) (Study of Decision Number: 155/Pid/2020/PT.TJK)

**By
Fransisca Emilia**

The murder case involving SY that led to the decision of the Menggala District Court Number 243/Pid.B/2020/PN.Mgl is a case that attracted public attention. This case went through a long legal process, where the defendant was initially convicted with 17 years of imprisonment. However, on appeal, the Tanjungkarang High Court in Decision Number 155/Pid/2020/PT.TJK acquitted the defendant of all charges. The problems in this thesis are how is the responsibility of the perpetrator of the crime of rape and murder against acquittal in Decision Number: 155/Pid/2020/PT.TJK, whether the judge's decision in the case of the crime of rape and murder against acquittal is in accordance with substantive justice.

The approaches used are normative juridical and empirical juridical approaches and in collecting data by literature study and field study. The sources of this research are Judges of the Menggala District Court, Judges at the Tanjungkarang High Court and Lecturers of the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. The data collected is analyzed descriptively-qualitatively.

*Based on the results of research and discussion, the acquittal decision of the Tanjungkarang High Court was based on the lack of valid and convincing evidence, with the application of the principle of *in dubio pro reo*. However, the Supreme Court overturned the decision of the Tanjungkarang High Court and imposed a heavier sentence of 20 years in prison on the defendant Berinisial SY, because he was found to have participated in this case together with T. The author found errors in the analysis of facts by the appellate judges, prioritizing the testimony of the defendant over other evidence at trial. This shows that the principle of in the criminal law system must prioritize the balance between the rights of the defendant and the rights of the victim to achieve substantive justice, the judge's decision in rape and murder cases must reflect substantive justice, not only formal legal certainty. The Supreme Court corrected the acquittal verdict at the Tanjungkarang High Court affirming sufficient evidence. Judges play a role in balancing legal certainty, victim protection, and social impact in every decision.*

Fransisca Emilia

As a suggestion, law enforcement against serious crimes must be carried out carefully. Improved investigations, evidence and indictments are needed to achieve justice. Witness and victim protection and judicial transparency must be strengthened. Acquittal of defendants reflects substantive justice if evidence is insufficient. Investigations and indictments must be strengthened. Judges must consider new evidence in appeals, while victims continue to receive legal and psychological protection

Keywords: Acquittal (Vrijspraak), Rape, Murder.